

POLITIK:
ANTARA LEGALITAS
DAN MORALITAS

POLITIK:
ANTARA LEGALITAS
DAN MORALITAS



PENERBIT LITA LITA
PALANGKAHARAJA 2009

Otto Gusti Madung
POLITIK: ANTARA LEGALITAS DAN MORALITAS

Penulis: Otto Gusti Madung
Desain Sampul: Ong Hari Wahyu
Tata letak: Arif Nr

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit Ledalero
Cetakan I, April 2009.

Penerbit Ledalero
Anggota IKAPI
Seminar Tinggi Ledalero
Maukere 86152
Tel. (0382) 22898, Fax. (0382) 22898
e-mail: penerbitledalero@yahoo.com
www.penerbitledalero.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Otto Gusti Madung

POLITIK: ANTARA LEGALITAS DAN MORALITAS

Cet. I - Maukere: Penerbit Ledalero, 2009, xxii + 205 hlm, 120 x 190 mm.

ISBN 979-978-9447-83-1

1. I. Judul.
- II. Madung, Otto Gusti

Dicetak oleh:
CV. Titian Galang Printika
Jl. Madukismo, Bugisan Selatan No. 15 A, Yogyakarta 55181
Telp/Fax. (0274) 387928; e-mail: galang_printika2005@yahoo.com

KATA PENGANTAR

“Kerajaan-kerajaan tanpa keadilan apa itu selain gerombolan-gerombolan perampok? Oleh karena itu halus dan benar jawaban yang diberikan oleh seorang perampok laut kepada Iskandar Agung, sewaktu sang raja bertanya bagaimana dia itu sampai berani membuat laut menjadi tidak aman. Maka orang itu dengan bangga dan terbuka mengatakan: ‘Dan bagaimana engkau sampai berani membuat seluruh bumi menjadi tak aman? Memang, aku dengan perahu kecil-ku disebut perampok, tetapi engkau dengan angkatan laut besar disebut panglima yang jaya.’”
(Aurelius Agustinus)¹

Negara pada prinsipnya dipandang sebagai lembaga kekuasaan yang legitim jika dibandingkan dengan kelompok para bandit

¹ De Civitate Dei IV, 4 (Dikutip dari Magnis- Suseno, Franz, *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modernen*, Gramedia, Jakarta 1999, hlm. 193)

atau perampok yang mungkin memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu, tapi kekuasaannya dipandang sebagai ilegitim. Pertanyaannya ialah, apakah dasar dari tuntutan legitimasi negara tersebut? Apa yang membedakan kelompok para bandit dari negara? Apakah mungkin sebuah negara menjadi lembaga berkumpulnya para bandit? Atas alasan apa manusia menjadikan negara sebagai sarana untuk mengorganisir hidup sosialnya?

Persoalan tentang legitimasi negara ingin menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa negara yang ada secara konkret itu harus diakui, diterima dan “berhak mendapat ketundukan dari para warganya”.² Persoalan seputar legitimasi itu dapat didekati dengan dua cara. *Pertama*, secara *pragmatis* dapat diajukan pertanyaan, entah ada manfaatnya mendirikan sebuah negara: Adakah ciri-ciri khusus manusia yang menjadikan negara sebagai sesuatu yang diinginkan? Keuntungan apa saja yang mungkin bagi manusia jika negara didirikan? Apakah masih ada bentuk hidup bersama lain yang bisa dijadikan alternatif bagi negara? Apakah anarki tidak lebih baik ketimbang hidup dalam sebuah negara? Negara Orde Baru misalnya menggunakan legitimasi pragmatis dengan menjadikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai pen-
dasarannya.

Kedua, kita dapat mengajukan pertanyaan, entah mendirikan negara secara *moral* atau *etis*

² Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara. Sebuah Persoalan*, Indonesiatara, Magelang 2004, hlm. xxxi

legitim. Apakah dasar legitimasi bahwa manusia boleh menguasai manusia lain? Apakah dapat diterima bahwa manusia sebagai pribadi bebas tunduk di bawah paksaan institusi, aturan-aturan abstrak serta birokrasi tanpa jiwa? Apakah demi pragmatisme pembangunan ekonomi orang-orang miskin boleh digusur dari tempat tinggalnya?

Pertanyaan-pertanyaan seputar sumber legitimasi negara telah menjadi bahan refleksi dan pergulatan intelektual para pemikir atau filsuf politik sepanjang zaman. Secara garis besar sejarah pemikiran politik mencatat dua jenis legitimasi keberadaan negara yang tetap bertahan hingga dewasa ini yakni legitimasi moral dan pandangan positivisme hukum. Legitimasi moral bermula dari konsep hukum kodrat yang dicetuskan oleh Aristoteles dan para filsuf Stoa dan kemudian dikembangkan oleh Cicero, Agustinus, Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Hugo Grotius dan Christian Wolff. Mereka memandang negara dan tatanan hukumnya sebagai sarana menciptakan keadilan. Sumber legitimasi negara adalah moralitas yang berlaku universal. Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Ia hanya ditaati sejauh menjalankan fungsinya dalam batas-batas moral tertentu.

Legitimasi moral ini berseberangan dengan positivisme hukum yang terdiri dari pelbagai aliran, tapi pada prinsipnya menganut tesis dasar bahwa konsep dan validitas hukum tak berkaitan sama sekali dengan penilaian moral dan bentuk-bentuk

penilaian lainnya. Bentuk ekstrem positivisme hukum berasal dari Thomas Hobbes (1588 – 1679). Menurut Hobbes, otoritas penguasa yang menjadi sumber legitimasi hukum satu-satunya. *Auctoritas, non veritas facit legem* – Otoritas dan bukan kebenaran yang menciptakan hukum. Dewasa ini positivisme hukum tidak lagi berasal dari otoritas penguasa, tapi lebih merujuk pada paradigma fungsional teori sistem.

Maka secara ideal kita mengenal dua jenis teori legitimasi keberadaan negara yakni paradigma moral atau hukum kodrat dan paradigma pragmatis atau fungsionalistis. Baiklah kita mendalami kedua paradigma ini dengan menjelajahi beberapa tahapan perjalanan sejarah filsafat politik.

Seperti sudah dikemukakan secara singkat, Aristoteles (384-322 SM) meneropong keberadaan negara dari perspektif hukum kodrat. Dalam karyanya berjudul *Politik* ia mendefinisikan manusia sebagai *zoon politikon*³ atau makhluk sosial. Secara kodrati manusia adalah makhluk berpolitik. Dengan tesis ini Aristoteles ingin menegaskan tiga hal.⁴ *Pertama*, Aristoteles menolak segala bentuk legitimasi teologis dan mistis politik. Jika politik merupakan ungkapan hakikat manusia, maka ia tidak membutuhkan campur tangan ilahi atau para dewa sebagai syarat keberadaannya.

³ Aristoteles, *Politik*, diedit oleh Ursula Wolf, Rheinbeck bei Hamburg 1994, hlm. 47 (1,2, 1253a2-3)

⁴ Henning, Ottmann, *Geschichte des politischen Denkens* Band 1/2 (Die Griechen), Metzler Verlag, Stuttgart 2001, hlm. 176

Kedua, jika manusia dari *sononya* bersifat politis, maka politik tidak membutuhkan kontrak sosial atau konvensi. Di sini kita melihat perbedaan fundamental teori negara aristotelian dengan paham negara modern hobbesian misalnya yang menjadikan perjanjian sebagai sumber legitimasi pendirian sebuah negara.

Ketiga, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam *polis* atau negara kota. Untuk menjelaskan hubungan antara *manusia* dan *polis* Aristoteles menggunakan term potensi dan aktualitas. "Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai pemenuhannya ketika mencapai tujuannya, demikianpun dengan manusia, ia hanya dapat mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam *polis*. *Polis* adalah aktualisasi dari potensi khusus manusia."⁵

Dengan menempatkan sosialitas sebagai prioritas di hadapan individu Aristoteles dicurigai dan sering dikritik sebagai filsuf politik yang mau mendirikan sistem politik totalitarian. Kritikan seperti ini keliru. Sebab tujuan polis adalah merealisasikan kebaikan tertinggi dan hidup bahagia untuk semua warga polis yang bebas. Sementara sebuah sistem politis totalitarian hanya melayani kepentingan segelintir orang. *Polis* sebagai komunitas warga yang bebas dan egaliter melayani kepentingan semua. Pemahaman polis seperti ini adalah bentuk negasi atas kekuasaan despotis.

⁵ Ibid., hlm. 176

Konsep politik aristotelian terus menjelajahi sejarah pemikiran politik hingga abad modern. Hannah Arendt (1906-1975), untuk menyebut salah satu nama, dalam kritiknya atas teori dan praktik politik modern merujuk pada konsep politik aristotelian ini. Dalam karyanya *Vita activa* (Kehidupan aktif) Arendt membedakan tiga kategori kegiatan manusia yakni *Arbeiten* (kerja), *Herstellen* (produksi) dan *Handeln* (aksi politik). "Aksi politik adalah kegiatan *vita activa* satu-satunya yang berlangsung antarmanusia tanpa perantara materi, barang-barang dan benda."⁶ Aksi politik adalah dialog langsung antarmanusia. Politik terwujud dalam komunikasi antarwarga yang bebas dan egaliter. Akan tetapi sebuah komunikasi hanya mungkin jika ada macam-macam manusia. Jika hanya ada satu manusia di puncak piramida kekuasaan dan yang lain tidak lebih dari massa yang tidak tahu apa-apa, maka di sana tidak ada politik. "*Sang* Manusia itu apolitis. Politik berlangsung di antara manusia-manusia, maka politik berada di luar manusia. Karena itu tak ada substansi politis."⁷ Politik dibangun ketika manusia berbicara, berkomunikasi dan membangun wacana. Komunikasi mengandaikan faktum pluralitas manusia. Jika manusia semuanya seragam, maka tidak terjadi dialog dan tidak ada politik. Konsep politik Hannah Arendt adalah hasil refleksinya dari perspektif korban atas regim brutal dan totaliter

⁶ Arendt, Hannah, *Vita activa oder Vom tätigen Leben*, Piper Verlag, München 2003, hlm. 17

⁷ Arendt, Hannah, *Was ist Politik?* Piper Verlag, München 2003,

Jerman di bawah pimpinan Hitler yang telah menghancurkan kebhinekaan atas nama sebuah keseragaman.⁸

Politik adalah “kebersamaan dan ketersalingan dalam kebhinekaan”.⁹ Kebersamaan dalam perbedaan itu terjadi dalam kebebasan. Maka kebebasan mengungkapkan makna terdalam politik. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan dari segala bentuk keharusan dalam kerja dan produksi. Kerja merupakan jawaban manusia atas tuntutan hidup. Pada tataran ini manusia sama dengan binatang (*animal laborans*). Ia memusatkan diri pada hidupnya sendiri, tubuh dan kodrat biologisnya.¹⁰ Pada tingkat ini manusia pada prinsipnya tidak membutuhkan orang lain.

Lewat produksi (*herstellen*) manusia menciptakan alat-alat yang membuatnya mampu menguasai alam sehingga ia bebas dari ketergantungan binatang. Manusia bekerja dan mulai mengubah dunia menjadi habitatnya (*homo faber*). Di sini manusia membutuhkan orang lain, tapi hanya sebagai alat yang membantu kelancaran kerjanya. Kegunaan adalah rasionalitas untuk mengukur segalanya termasuk hubungan dengan manusia lain. Ruang publik satu-satunya untuk *homo faber* adalah pasar yang berkerja atas dasar rasionalitas instrumental. Meskipun di dunia karya ini terdapat

⁸ Bdk. F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas. Diskursus tentang Massa, Terror dan Trauma*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005, hlm. 21

⁹ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁰ Bdk. Haryatmoko, *Etika. Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2003, hlm. 156dst.

hubungan manusia dengan manusia lain, relasi tersebut hanya sebatas relasi profesional tanpa melibatkan hubungan antarpribadi yang unik.¹¹ Yang ditekankan adalah kompetensi dan bukan kualitas hubungan.

Politik untuk Hannah Arendt adalah ungkapan kebebasan. Dan kebebasan mengandaikan kehadiran dan pengakuan yang lain sebagai pribadi unik. Keunikan setiap pribadi merupakan dasar pluralitas sebagai titik tolak politik. Pluralitas sebagai syarat politik terungkap lewat proses persetujuan, kritik, penolakan dan kerja sama. Keseluruhan proses ini terjadi dalam komunikasi atau wicara. Maka politik adalah wicara atau diskursus rasional bebas represi. Ketika politik menjadi lahan mata pencaharian, maka wicara macet dan politik pun dikuburkan. Sebab di sana terjadi dominasi “orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi”.¹² Politik sebagai sumber mata pencaharian memperlakukan ruang publik sebagai pasar yang marak KKN, propaganda, kebohongan, iklan politik dengan penekanan pada penampilan luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan.

Dengan merujuk pada konsep normatif politik aristotelian Hannah Arendt mengeritik paradigma politik yang bersifat teknis dan fungsional pada abad modern. Aristoteles, seperti sudah dipaparkan, memandang manusia dari kodratnya sebagai

¹¹ Bdk. *Ibid.*, hlm. 157

¹² *Ibid.*, hlm. 158

mahluk sosial dan politis. Teori politik modern menyangkal dimensi sosial kodrat manusia dan bersama Thomas Hobbes menciptakan fundamen antropologis baru untuk teori politik. Hobbes adalah peletak dasar teori politik modern dan mengembangkan filsafat berorientasi individualistis. Dari kodratnya manusia tidak bersifat sosial dan politis, tapi merupakan individu yang berpusar pada dirinya sendiri. Politik modern dibangun atas fundamen rasionalitas ekonomis. Hobbes merancang sebuah antropologi konflik ekonomis berhadapan dengan antropologi kooperatif aristotelian.¹³ Bertolak dari paradigma normatif aristotelian Hannah Arendt menggambarkan politik abad modern sebagai a-politis. Sebab politik modern didominasi oleh konsep produksi. Arendt ingin menghidupkan kembali jiwa politik aristotelian. Pertanyaannya ialah, entah teori politik Arendt ini cukup realistis dalam menjawab realitas politik. Sejauh mana teori Arendt tanggap terhadap dimensi struktural dan institusional politik? Arendt memandang *polis* Yunani Kuno sebagai ideal dari “yang politis”. Akan tetapi kehidupan politik dari manusia-manusia bebas dan egaliter dalam *polis* hanya mungkin karena perempuan, anak-anak dan para budak dipinggirkan dari ranah politik. Dengan demikian Hannah Arendt dalam teorinya menutup-nutupi

¹³ Kersting, Wolfgang, “Einleitung: die Begründung der politischen Philosophie der Neuzeit im *Leviathan*” dalam: *ibid.* (ed.), *Thomas Hobbes Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates (Klassiker Auslegen)*, Akademie Verlag, Berlin 1996, hlm. 13

aspek kekerasan struktural dalam *oikos* masyarakat Yunanu Kuno.

Konsep politik kontemporer mengandung aspek normatif dan teknis sekaligus. Keduanya berfungsi menurut logika berbeda pula. Paradigma normatif mengikuti logika sosial, sementara paradigma teknis berpedoman pada logika produksi. Paradigma aristotelian dan politik kekuasaan hobbesian tetap hadir dalam konsep dan praktik politik kontemporer. Norma, tatanan dan institusi politik adalah dimensi formal politik, sementara dimensi materilnya terungkap dalam bentuk kekuasaan, interese dan konflik.

John Rawls, salah seorang filsuf politik terkemuka abad 20, mengembangkan teori politiknya atas dasar *factum pluralisme*. Masyarakat modern ditandai adanya pluralisme agama, ideologi, pemahaman tentang etika dan filsafat. Kebhinekaan tidak hanya mewarnai tatanan sosial. Pada tingkat personal setiap individu memiliki pengertian sendiri tentang ide kebahagiaan dan kebaikan. Kebhinekaan ini merupakan rasionalitas masyarakat modern yang demokratis. Ia adalah hasil kreasi dan wujud nyata kebebasan berpikir manusia. Itulah sebabnya, John Rawls menamakannya kenyataan pluralisme yang rasional.

Atas dasar faktum pluralisme di atas bagaimana sebuah negara yang terdiri dari warga yang bebas dan egaliter bisa terbangun? Kekuasaan negara ala Hobbes menurut John Rawls tidak cukup menyelesaikan persoalan ini. Karena kita tidak dapat

membangun kehidupan bersama hanya atas dasar kekerasan. Bagaimana sebuah kehidupan bersama mungkin tanpa adanya perang antarbudaya dan ideologi di tengah faktum pluralisme itu?

Konsep keadilan politis adalah jawaban yang diberikan Rawls guna membangun kehidupan bersama di tengah pluralisme. Konsep keadilan Rawls bukan konsep metafisis, tapi sebuah konsensus rasional guna menciptakan stabilitas kehidupan bersama. Kualitas keadilan politis tidak hanya diukur berdasarkan legitimasi argumentatifnya, tapi juga pada fungsi dan kemampuan politisnya. Di tengah benturan budaya dan ideologi politik harus mampu menciptakan perdamaian. Dalam teorinya Rawls coba memadukan paradigma politik normatif dan pragmatis. Filsafat politik Rawls menghubungkan konsep hobbesian tentang politik sebagai pengamanan demi kesatuan sosial dengan pengakuan prinsip otonomi individu. Di samping itu ia coba menghidupkan kembali proyek solidaritas dan kesadaran komunitas republikan di tengah fragmentasi budaya dan individualisme masyarakat modern. Dengan memadukan aspek kekuasaan, otonomi individu dan solidaritas republikan Rawls membangun kesatuan politis yang dikontrol oleh rasionalitas publik dan bukan semata-mata oleh sebuah kekuatan Leviathan yang represif.

Buku di hadapan Anda ini memuat pelbagai tulisan yang beberapanya pernah menjadi bahan seminar ketika belajar di München, Jerman. Sebagiannya lagi adalah tulisan yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta di beberapa koran baik lokal maupun nasional. Ruang lingkup pembahasan tulisan-tulisan ini berpusar sekitar persoalan-persoalan filsafat politik seperti pluralisme dan dialog antarbudaya, demokrasi, agama dan politik, faham hak-hak asasi manusia, sejarah dan ingatan kolektif serta hubungan antara negara dan moralitas pribadi.

Tulisan-tulisan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Jenis tulisan pertama lebih bersifat teoretis-filosofis. Di sini penulis bergelut dengan pemikiran-pemikiran filosofis seputar persoalan globalisasi dan dialog antarbudaya, agama dan negara, pluralisme dan liberalisme politik serta pendasaran filosofis universalitas HAM. Tulisan jenis kedua lebih berorientasi praksis. Penulis mengangkat persoalan-persoalan konkret politik sehari-hari seperti kekerasan, terorisme, pengesahan UU Pornografi, tindakan main hakim sendiri dan diskriminasi. Peristiwa-peristiwa politik tersebut coba dibaca dalam kaca mata etika politik.

Kendatipun kumpulan tulisan ini berbicara tentang bermacam-macam pokok persoalan, pada prinsipnya ia mau mengajukan dan membahas satu hal dasar yakni pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan. Pertanyaan tentang legitimasi menjadi penting ketika kita mau menata hidup bersama

secara demokratis dalam kebebasan, suasana egaliter dan pengakuan akan pluralitas budaya, agama dan pandangan hidup. Pertanyaan tentang legitimasi senantiasa bergerak dari kutup legalitas dan moralitas, positivisme hukum dan aspek normatif politik.

Buku ini dapat hadir di hadapan publik berkat jasa dan bantuan beberapa pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada *Penerbit Ledalero* yang rela mempublikasikan karya ini. Ucapan terima kasih juga saya alamatkan kepada Pater Dr. Georg Kirchberger SVD yang telah memberanikan dan memotivasi saya untuk menerbitkan kumpulan artikel ini. Beliau juga telah meluangkan waktu untuk membaca naskah dan memberikan beberapa catatan kritis atasnya.

Semoga tulisan ini dapat mengambil bagian dalam diskursus publik demi membangun sebuah tatanan politis yang lebih beradab.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xix
Bagian 1 Makalah	1
1. KONSEP RASIONALITAS KOMUNIKATIF JÜRGEN HABERMAS DAN PERDAMAIAN GLOBAL	3
Pendahuluan	3
1. <i>Latar Belakang Pemikiran Jürgen Habermas</i>	7
2. <i>Rasionalitas Komunikatif versus Rasionalitas Instrumental</i>	10
3. <i>Sumbangan Konsep Rasionalitas Komunikatif untuk Perdamaian Global</i>	25
4. <i>Penutup dan Catatan Kritis</i>	38

2. RASIONALITAS, KEBUDAYAAN DAN LIBERALISME POLITIK	43
1. <i>Pendahuluan</i>	43
2. <i>Basis Kultural Konsep Liberalisme Politik</i>	47
3. <i>Konstruksi Liberalisme Politik</i>	50
4. <i>Ide-Ide Abstrak dan Konsep Keadilan sebagai Orientasi</i>	60
Penutup.....	67
3. KONSEP “RELIGIO CIVILIS” – TELAH PEMIKIRAN J.J. ROUSSEAU TENTANG HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN POLITIK.....	71
1. <i>Pengantar</i>	71
2. <i>Latar Belakang Munculnya Konsep Religio Civilis dalam Pemikiran Rousseau</i>	74
3. <i>Konsep Religio Civilis menurut J.J. Rousseau</i>	84
4. <i>Kesimpulan dan Beberapa Catatan Kritis</i>	98
Daftar Kepustakaan	102
4. REKONSTRUKSI DISKURSUS FILSOSOFIS TENTANG FAHAM HAK-HAK ASASI MANUSIA	105
1. <i>Pendahuluan</i>	105
2. <i>Pengertian HAM</i>	108
3. <i>Pendasaran Filosofis HAM</i>	117
4. <i>Kesimpulan</i>	129
Daftar Pustaka	135

Bagian 2 Opini	137
5. AGAMA, ILMU PENGETAHUAN DAN <i>COMMONSENSE</i>	139
6. MENGOLAH PLURALISME VERSI JOHN RAWLS.....	147
7. HAK ASASI MANUSIA: MANIFESTASI SOLIDARITAS SOSIAL	155
Relativisme Budaya.....	158
Urgensi HAM	163
8. ANTARA ANARKISME DAN LEVIATHAN	167
9. UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI, MORALITAS PRIBADI DAN DEMOKRASI.....	175
10. UU PORNOGRAFI, PREMANISME DAN FAILED STATE ...	183
11. SEJARAH DARI PERSPEKTIF KORBAN	189
Rekomendasi DPR.....	191
Kematian.....	193
12. SISIPHUS DAN PERJUANGAN PENEGAKAN HAM	197
SUMBER NASKAH	203

